

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/JURNAL

- Albrow, M., 1989, Birokrasi. Jakarta: Tiara Wacana.
- Barata, Atep, 2004, Dasar- dasar Pelayanan Prima, Jakarta: Elex Media. Komputindo.
- Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran, 2000. Pengantar Sistem Perbankan, Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran.
- Devanport, T.H., 1993, *Process innovation: reengineering work through information technology*, Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press.
- Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, 2010, Hukum Perbandingan Konstitusi, Yogyakarta: Total Media.
- Fajar Mukti & Achmad Yulianto, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handyaningrat, S., 2002, Pengantar Suatu Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta: Gunung Agung.
- Isstanto, F. Sugeng, 2007, Penelitian Hukum, Yogyakarta: CV Ganda.
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kasmir, 2006, Manajemen Perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kertapradja, Koswara, 2002, Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemendirian Rakyat, Jakarta: Candi.

- Kurnia, Asep, 2014, Peningkatan Nilai Tambah Paspor Republik Indonesia, peningkatan nilai tambah paspor Republik Indonesia, Jakarta: Ditjen Imigrasi.
- Lewis, Carol W, and Stuart C. Gilman, 2005, *The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide*. Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius.
- Maria S.W. Sumarjono, 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Peneitian, Sebuah Panduan Dasar, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Mertokusumo Sudikno, 2009, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2006, Manajemen Pelayanan, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Roth, Gabriel Joseph, 1926, *The Privat Provision of Public Service in Developing Country*. Washington DC: Oxford University Press.
- Soekanto, Soerjono, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press.
- Soemantri, Sri, 1997, Hak Uji Material Di Indonesia, Bandung: Alumni.
- Soeprapto, Farida Indrati, 2010, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius.

Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto & Sri Mamji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*

Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suradinata, Ermaya, 1998, *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Bandung:

Ramadan.

Suwarno, Yogi, 2008, *Inovasi Di Sektor Publik*, Jakarta: STIA LAN Press.

Tjiptono, Fandy, 1997, *Total Quality Service*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Untoro, 2009, *Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Ritel dan Makro Melalui*

*Pengembangan National Payment Gateway (Studi Pada Empat Bank Umum di Indonesia)*, Semarang: Universitas Diponegoro.

Wognjosoebroto, Soetandyo, 2009, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai*

*Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Yuliani, Sri. 2007, *Mewujudkan Birokrasi Yang Pro-Citizen*, Yogyakarta: *Jurnal*

*FISIP UNS. Vol. 3 No.1 Th.2007*

## **WEBSITE**

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150325111750-12-41681/payment-gateway-ternyata-mencontoh-surabaya/> pada tanggal 15 April 2015

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150325083040-12-41634/pengacara-denny-kemenkeu-izinkan-payment-gateway/> pada 10 Agustus 2015

[http://en.wikipedia.org/wiki/public\\_service](http://en.wikipedia.org/wiki/public_service) pada tanggal 10 Oktober 2015.

<http://www.kajianpustaka.com/2013/01/pelayanan-publik.html>, pada tanggal 16 Oktober 2015.

## **Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-undang Nomor Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/ PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian

Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor

63/Kep/M.PAN/7/2003.